



Tiga Wilayah Masuk Level 4

■ Sekda Sebut Mobilitas Warga Turun

**Di DIY
meneruskan
kebijakan
pusat yang
disebut
dengan
PPKM
Level 4.
Ketentuannya
sama dengan
PPKM
Darurat
kemarin.**

YOGYA, TRIBUN - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Sebelumnya pemerintah menerapkan PPKM Darurat dari tanggal 3 hingga 20 Juli. Namun pada periode kedua ini istilah PPKM Darurat digantikan dengan PPKM Level 3-4.

Namun demikian, menurut Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, peraturan dan pelaksanaannya masih sama dengan PPKM Darurat.

Dengan adanya perpanjangan ini maka Pemda DIY belum akan melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat.

Saat ini sektor non esensial dan ruang-ruang publik termasuk tempat wisata pun masih dilarang untuk buka.

"Di DIY meneruskan kebijakan pusat yang disebut dengan PPKM

Level 4. Ketentuannya sama dengan PPKM Darurat kemarin," jelas Sekda Baskara Aji, Rabu (21/7).

Aji menjelaskan, saat ini Pemda DIY telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 19/INSTR/2021 tentang PPKM Level 4 di DIY.

Hal ini menindaklanjuti terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang hal yang sama.

Sekda Baskara Aji menjelaskan, ada tiga wilayah yang masuk kategori Level 4. Yakni, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Sementara untuk dua wilayah lainnya, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masuk Level 3.

Sebagai informasi, Level 4 artinya jumlah kasus Covid-19 di wilayah ini lebih dari 150 kasus per 100 ribu penduduk tiap pekannya.

● ke halaman 11

Tiga Wilayah

● Sambungan Hal 1

Kemudian, perawatan di rumah sakit lebih dari 30 per 100 ribu penduduk per minggu. Selain itu, kasus kematian lebih dari 5 per 100 ribu penduduk per minggu.

Adapun Level 3 artinya terdapat 50-150 per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian, perawatan di rumah sakit terdapat 10-30 per 100.000 penduduk per minggu. Selain itu, jumlah kematian 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.

"Kebijakanannya itu sama untuk Level 3 dan 4. Yang beda Level 1 dan 2," paparnya.

Menurutnya, jika kasus terkonfirmasi dapat ditekan, pemerintah akan melakukan pelanggaran secara bertahap pada tanggal 26 Juli mendatang.

Misalnya, pelaku usaha

non esensial akan diperkenankan untuk kembali berjualan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi pembatasan jam operasional.

"Nanti tanggal 26 pemerintah akan melihat angka penurunan kasus itu, nanti ada pelanggaran secara bertahap. Nanti ada tanggal 26 pasti ada Imendagri lagi," jelasnya.

Mobilitas warga

Terkait evaluasi PPKM Darurat 3-10 Juli, Sekda Bas-kara Aji menilai tergolong berhasil.

Hal ini ditunjukkan dari tingkat penurunan mobilitas warga yang juga menjadi indikator keberhasilan kebijakan tersebut.

Saat ditemui di kantornya, Aji merinci, berdasarkan hasil evaluasi PPKM Darurat sepanjang 3 hingga 20 Juli 2021, ada sejumlah aktivitas masyarakat yang mengalami penurunan.

Penurunan itu ditemui

pada aktivitas transportasi umum sebesar 49 persen, aktivitas di taman-taman 33 persen, tempat rekreasi 25 persen, dan tempat kerja sebesar 21 persen.

"Memantaunya melalui aplikasi Google Mobility," terangnya.

Kendati demikian, ada pula aktivitas yang meningkat di masyarakat. Meliputi aktivitas di toko bahan makanan dan apotek sebesar 9 persen serta area permukiman sekitar 13 persen.

Lebih jauh, Aji menjelaskan, saat ini Pemda DIY juga berhasil menurunkan jumlah pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Yakni dari 28 ribu menjadi 25 ribu pasien pada hari ini.

"Kita terus mendorong agar yang isoman mau masuk ke selter agar kondisinya benar-benar dipantau," bebernya.

Saat ini Pemda DIY tengah mengupayakan pengadaan lima RS lapangan di DIY.

Satu yang telah direalisasi adalah RSUD Respati yang diampu oleh RSUD Prambanan, Sleman.

Empat RS sisanya akan dibangun dengan memanfaatkan asrama UGM, asrama UNY, rumah susun ASN BBWS serta Pusdiklat PU Ngeksigondo.

Rumah sakit lapangan ini akan dipakai untuk menampung pasien dari RS rujukan Covid-19 yang kondisinya telah membaik.

Ketua Satgas Harian Covid-19 Kota Yogyakarta, Herroe Poerwadi tidak menampik bahwa kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi.

Hal kedua yang menjadi catatan dan perlu dievaluasi yakni, aktivitas dan mobilitas masyarakat di Yogyakarta masih terbilang tinggi.

"Sehingga untuk saat ini yang akan kami kuatkan adalah, agar masyarakat dalam mobilitasnya dibatasi," katanya. (tro/hda)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005